

## IMPLEMENTASI KERJA SAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) INDONESIA DENGAN *MARINE STEWARDSHIP COUNCIL* (MSC) DALAM SERTIFIKASI EKSPOR RAJUNGAN LAMONGAN JAWA TIMUR

Putri Yasmin Imarotul Mujaddidah <sup>1)</sup>, Rizki Rahmadini Nurika <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

<sup>2)</sup>Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Correspondence		
Email: <a href="mailto:putriyasmin081004@gmail.com">putriyasmin081004@gmail.com</a> <a href="mailto:rr.nurika@uinsby.ac.id">rr.nurika@uinsby.ac.id</a>		No. Telp: 08989761340
Submitted 20 Mei 2025	Accepted 23 Mei 2025	Published 24 Mei 2025

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dengan *Marine Stewardship Council* (MSC) dalam sertifikasi produk rajungan di Lamongan, Jawa Timur. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dinamika kolaborasi, tantangan, dan dampak sertifikasi MSC terhadap keberlanjutan perikanan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan kuesioner daring kepada pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi MSC berpotensi meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, memperbaiki praktik perikanan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan. Meskipun terdapat tantangan teknis, seperti keterbatasan sumber daya dan biaya, dukungan dari KKP dan lembaga donor internasional sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama KKP-MSC dapat memperkuat sektor perikanan berkelanjutan dan menjadi contoh bagi negara lain. Ke depan, diperlukan peningkatan dukungan teknis dan edukasi bagi nelayan skala kecil serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

**Kata kunci:** Sertifikasi MSC; KKP; Rajungan; Keberlanjutan; Perikanan.

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of cooperation between the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) and the Marine Stewardship Council (MSC) in the certification of rajungan products in Lamongan, East Java. The primary objective of this study is to understand the dynamics of collaboration, challenges, and the impact of MSC certification on fisheries sustainability and local community welfare. The research methodology employed a qualitative approach, including in-depth interviews and an online questionnaire administered to relevant stakeholders. The research findings indicate that MSC certification has the potential to enhance the competitiveness of Indonesian fishery products in the global market, improve fishing practices, and provide economic benefits for fishermen. Despite technical challenges, such as limited resources and costs, support from KKP and international donor agencies is crucial for the successful implementation of the program. This study concludes that KKP-MSC collaboration can strengthen the sustainable fisheries sector and serve as a model for other countries. Moving forward, increased technical support and education for small-scale fishermen, as well as strengthened coordination among stakeholders, are needed.*

**Keywords:** MSC Certification; KKP; Rajungan; Sustainability; Fisheries.

### Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekosistem laut yang paling kaya di dunia, memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia berperan penting dalam mengatur dan melindungi sumber daya ini, terutama dalam konteks tangkapan dan keberlanjutan lingkungan. Di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan, sertifikasi perikanan menjadi salah satu solusi yang diadopsi. Salah satu inisiatif global yang berpengaruh adalah *Marine Stewardship Council* (MSC), yang bertujuan untuk meningkatkan praktik perikanan

yang berkelanjutan melalui sertifikasi yang diakui secara internasional (Arton et al., 2020; Tulaeva et al., 2023; Wiadnya et al., 2023). Dalam konteks ini, kerjasama antara KKP Indonesia dan MSC menjadi sangat relevan.

Rajungan (*Portunus pelagicus*) dari Lamongan, Jawa Timur, merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan secara internasional, dan sertifikasi dari MSC dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi produk lokal di pasar global. Penerapan sertifikasi MSC diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya perikanan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia, serta memastikan keberlangsungan ekosistem laut (Melnychuk et al., 2022; Oloruntuyi et al., 2023; Wiadnya et al., 2023). Selain itu, sertifikasi ini dapat mengurangi risiko penipuan dalam rantai pasokan perikanan dan meningkatkan transparansi bagi konsumen (Lawrence et al., 2024; Longo et al., 2021).

Penggabungan prinsip-prinsip keberlanjutan yang digariskan oleh MSC ke dalam kebijakan KKP diharapkan dapat menciptakan sinergi positif, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi nelayan (Anderson et al., 2021; Arton et al., 2020; Morris et al., 2023). Model kerjasama ini juga menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengadopsi praktik perikanan yang berkelanjutan. Melalui kerjasama tersebut, KKP berkesempatan untuk memperkuat kapasitas manajemen sumber daya perikanan yang berorientasi pada hasil yang lebih baik serta pemenuhan standar internasional (Santos et al., 2022; Tulaeva et al., 2023; Wiadnya et al., 2023). Namun demikian, tantangan dalam implementasi kerjasama ini tetap ada. Dari sisi teknis, perlu ada dukungan dari data dan penelitian yang mendalam mengenai status stok ikan dan dampak teknik penangkapan yang digunakan (Harlyan et al., 2023; Obregón et al., 2020). Selain itu, tingkat pemahaman konsumen mengenai sertifikasi perikanan dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi MSC di Indonesia (Costa et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengedukasi masyarakat dan relevansinya dengan nilai-nilai budaya lokal yang melekat di masyarakat pesisir (Keyser et al., 2022).

Kerjasama antara KKP dan MSC diharapkan dapat berlangsung dinamis, menggabungkan kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan akademisi, pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mengarah pada kepatuhan terhadap standar internasional tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup bagi nelayan serta keberlanjutan sumber daya perikanan di Lamongan, Jawa Timur. Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama antara KKP Indonesia dan MSC dalam sertifikasi ekspor rajungan tidak hanya meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan global yang lebih luas melalui manajemen perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan kekayaan laut Indonesia secara bijaksana, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

### Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif (Fadli, 2021; Sugiyono, 2019) untuk mengupas implementasi kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia dan *Marine Stewardship Council* (MSC) dalam konteks sertifikasi produk rajungan di Lamongan, Jawa Timur. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antara kedua pihak, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi MSC, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap keberlanjutan perikanan rajungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian metode yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti. Salah satu metode utama yang

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan kunci yang terlibat langsung dalam proses sertifikasi dan pengelolaan perikanan rajungan. Pemangku kepentingan yang diwawancarai termasuk perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur, serta Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (UPT PMP2KP). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari mereka mengenai peran masing-masing pihak dalam kerja sama ini, tantangan yang dihadapi dalam penerapan sertifikasi MSC, serta evaluasi terhadap keberhasilan dan kendala yang ada dalam implementasi program sertifikasi. Selain wawancara tatap muka, penelitian ini juga memanfaatkan kuesioner terbuka yang disebarluaskan secara daring melalui platform *Google Form* kepada pihak KKP yang terlibat dalam inisiatif kerja sama ini. Metode kuesioner daring ini dirancang untuk menjangkau responden yang memiliki keterbatasan waktu atau lokasi sehingga memudahkan pengumpulan data dari berbagai pihak yang mungkin sulit dijangkau melalui wawancara langsung. Kuesioner ini memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan pandangan mereka dalam bentuk jawaban yang lebih bebas dan beragam, mencakup aspek-aspek terkait efektivitas kerja sama, tantangan yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi MSC, serta persepsi mereka terhadap dampak sertifikasi MSC terhadap keberlanjutan perikanan rajungan dan kesejahteraan nelayan di Lamongan. Dengan menggabungkan wawancara mendalam dan kuesioner daring, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan beragam mengenai implementasi sertifikasi MSC, tantangan yang ada, serta dampaknya terhadap sektor perikanan lokal. Penggunaan kedua metode ini juga diharapkan dapat menggali perspektif yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, baik yang berada di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat industri perikanan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi kerja sama ini. Secara keseluruhan, pengumpulan data yang menggunakan pendekatan kualitatif ini memberikan kedalaman analisis terhadap masalah yang dihadapi serta dampak dari sertifikasi MSC terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan di Lamongan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini (Hardani et al., 2020; Patrisius Istiarto Djiwandono & Yulianto, 2023).

## Hasil dan Pembahasan

### Tahapan Implementasi Kerja Sama KKP-MSK

Implementasi kerja sama antara KKP dan MSC dalam sertifikasi rajungan di Lamongan berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca-sertifikasi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan sertifikasi dan mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan.

#### 1. Perencanaan dan Sosialisasi

Tahap pertama dalam implementasi kerja sama ini adalah perencanaan yang melibatkan identifikasi area penangkapan rajungan di Lamongan yang memenuhi kriteria keberlanjutan. Pada tahap ini, KKP bersama MSC melakukan pemetaan potensi dan kondisi sumber daya perikanan yang ada, untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dapat dijalankan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Selain itu, dilakukan sosialisasi kepada nelayan dan pengelola unit perikanan mengenai pentingnya sertifikasi MSC. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap keberlanjutan dan manfaat jangka panjang dari sertifikasi, baik dalam aspek ekonomi maupun lingkungan.

#### 2. Pelatihan Praktik Penangkapan Berkelanjutan

Pelatihan mengenai praktik penangkapan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar MSC juga merupakan bagian integral dari proses sertifikasi. KKP bekerja sama dengan MSC untuk memberikan pelatihan teknis kepada nelayan dan pengelola unit perikanan di Lamongan. Pelatihan ini mencakup teknik penangkapan yang tidak merusak ekosistem laut, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pelaporan hasil tangkapan secara

transparan. Melalui pelatihan ini, nelayan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan praktik penangkapan yang bertanggung jawab.

### 3. Penilaian Lapangan dan Audit

Tahap selanjutnya dalam proses sertifikasi adalah penilaian lapangan yang dilakukan oleh auditor MSC. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah praktik penangkapan rajungan yang dilakukan di Lamongan sudah memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh MSC. Penilaian ini melibatkan pengumpulan data mengenai metode penangkapan yang digunakan, dampaknya terhadap ekosistem laut, serta kesejahteraan nelayan. Proses ini juga mencakup kunjungan langsung ke lokasi penangkapan ikan untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip MSC.

### 4. Evaluasi dan Penerbitan Sertifikat

Setelah melalui proses penilaian yang mendalam, MSC akan melakukan evaluasi terhadap seluruh data yang dikumpulkan selama audit. Jika semua kriteria keberlanjutan terpenuhi, MSC akan menerbitkan sertifikat dan label MSC sebagai pengakuan bahwa produk rajungan dari Lamongan dikelola secara berkelanjutan. Sertifikat dan label MSC ini memberikan keuntungan kompetitif bagi produk rajungan Indonesia di pasar internasional, karena konsumen semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dalam produk yang mereka konsumsi. Sertifikat MSC juga memberikan akses ke pasar premium, terutama di negara-negara yang memiliki regulasi ketat terkait keberlanjutan, seperti di Eropa dan Amerika Utara.



Gambar 1. Sertifikasi Produk Perikanan MSC

### 5. Surveilans Tahunan

Meskipun sertifikat dan label MSC telah diterbitkan, proses pengawasan tidak berakhir di sini. MSC melakukan surveilans tahunan untuk memastikan bahwa praktik perikanan tetap konsisten dengan standar yang ditetapkan. Dalam surveilans ini, auditor akan meninjau data hasil tangkapan, aktivitas penangkapan selama setahun terakhir, serta implementasi rencana perbaikan jika ada pelanggaran yang ditemukan sebelumnya. Surveilans ini penting untuk memastikan bahwa perikanan yang telah bersertifikat tetap memenuhi standar keberlanjutan dan menjaga integritas sertifikasi yang telah diberikan.

## 6. Re-assessment

Setelah masa berlaku sertifikat selama lima tahun berakhir, perikanan harus menjalani proses re-assessment untuk memperbarui sertifikasinya. Proses ini hampir serupa dengan evaluasi penuh yang dilakukan sebelumnya dan bertujuan untuk memastikan bahwa perikanan tetap mematuhi standar MSC yang dapat berkembang seiring waktu. Penilaian ulang ini juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin teridentifikasi selama periode sertifikasi sebelumnya. Jika hasilnya memuaskan, sertifikasi akan diperpanjang untuk lima tahun ke depan.

### Tantangan dalam Implementasi Sertifikasi MSC

Meskipun kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Marine Stewardship Council (MSC) telah berjalan dengan baik, proses sertifikasi MSC tidak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh nelayan, terutama nelayan skala kecil. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh nelayan kecil, baik dari segi teknologi, pengetahuan, maupun pendanaan. Banyak nelayan yang kesulitan dalam memenuhi standar MSC karena terbatasnya akses mereka terhadap teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Alat tangkap yang lebih efisien dan minim dampak terhadap ekosistem laut sering kali sulit dijangkau oleh nelayan dengan kapasitas finansial terbatas. Selain itu, banyak nelayan yang kurang memahami praktik perikanan berkelanjutan yang menjadi dasar utama dalam sertifikasi MSC. Pengetahuan yang kurang mengenai cara pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelaporan transparan menjadi kendala lainnya dalam proses sertifikasi. Keterbatasan ini semakin diperburuk oleh kesulitan pendanaan yang dihadapi oleh nelayan, yang sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap modal untuk melakukan perbaikan dalam praktik perikanan mereka sesuai dengan standar MSC.

Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan oleh MSC dan KKP sangat penting. Program pelatihan yang terstruktur dan pendampingan yang intensif dapat membantu nelayan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menjalankan praktik perikanan yang berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup penggunaan alat tangkap ramah lingkungan tetapi juga pengelolaan stok ikan, pelaporan hasil tangkapan, serta pemantauan dampak lingkungan dari aktivitas perikanan. Namun, selain pelatihan, proses sertifikasi MSC yang panjang dan memerlukan biaya yang cukup tinggi menjadi hambatan besar bagi nelayan kecil. Biaya untuk audit, pelatihan, dan perbaikan teknis sangat membebani nelayan yang sudah memiliki keterbatasan finansial. Oleh karena itu, dukungan yang lebih besar dari pemerintah, lembaga donor, serta sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala-kendala ini. Pemerintah dapat memberikan insentif atau subsidi untuk membantu nelayan mengurangi biaya sertifikasi, sementara lembaga donor dapat menyediakan pendanaan tambahan untuk memastikan proses sertifikasi dapat diakses oleh nelayan kecil. Sektor swasta, terutama perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan perikanan, juga dapat berperan dengan menyediakan kemitraan yang menguntungkan bagi nelayan, seperti pembelian produk perikanan yang bersertifikat MSC atau investasi dalam teknologi yang mendukung keberlanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan nelayan skala kecil dapat mengatasi tantangan yang ada dan berhasil memenuhi standar sertifikasi MSC, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih besar bagi mereka (Judijanto et al., 2019; Yuniwati et al., 2025).

### Manfaat Sertifikasi MSC

Sertifikasi MSC memberikan berbagai manfaat yang signifikan, tidak hanya bagi nelayan, tetapi juga untuk konsumen dan lingkungan secara keseluruhan. Pertama, sertifikasi MSC membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk perikanan Indonesia, terutama di pasar internasional yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dari produk yang mereka konsumsi. Produk rajungan yang telah memperoleh sertifikasi MSC akan lebih mudah diterima

di pasar global, terutama di Eropa dan Amerika Utara, yang memiliki regulasi ketat terkait keberlanjutan perikanan. Di pasar-pasar ini, konsumen semakin cenderung memilih produk yang memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi, yang memastikan bahwa perikanan tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan (Melnychuk et al., 2022). Dengan demikian, sertifikasi MSC tidak hanya memberikan jaminan keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional yang semakin kompetitif.

Selain itu, sertifikasi MSC juga dapat meningkatkan harga jual produk perikanan. Produk yang telah bersertifikat MSC biasanya dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan produk non-bersertifikat, karena konsumen cenderung menghargai produk yang dianggap lebih ramah lingkungan dan dikelola dengan cara yang lebih bertanggung jawab. Hal ini tercermin dalam penelitian yang menunjukkan bahwa produk bersertifikat MSC sering kali mendapatkan premium price atau harga yang lebih tinggi karena dianggap lebih berkualitas dan lebih aman bagi lingkungan perikanan (Pramoda & Putri, 2018). Dengan demikian, sertifikasi MSC tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi akses pasar, tetapi juga meningkatkan pendapatan nelayan melalui harga yang lebih tinggi untuk produk mereka. Ketiga, sertifikasi MSC mendorong praktik perikanan yang lebih baik dengan mengurangi overfishing dan melindungi ekosistem laut yang lebih luas. Dengan mendorong penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan dan penerapan teknik pengelolaan yang lebih berkelanjutan, MSC berkontribusi pada pelestarian sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlanjutan jangka panjang sektor perikanan. Hal ini tidak hanya mendukung kesehatan ekosistem laut, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya perikanan dapat dikelola secara bertanggung jawab dan tidak habis, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan berbagai manfaat yang diperoleh, sertifikasi MSC menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan secara global dan memberikan manfaat yang luas bagi semua pihak yang terlibat.

### **Mekanisme Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak**

Meskipun kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Marine Stewardship Council (MSC) telah menunjukkan hasil yang positif, implementasi sertifikasi MSC tidak lepas dari sejumlah tantangan, khususnya yang dihadapi oleh nelayan skala kecil. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi teknologi maupun pengetahuan, yang dimiliki oleh nelayan lokal. Banyak nelayan yang tidak memiliki akses terhadap teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan, seperti alat tangkap yang dapat meminimalkan dampak terhadap ekosistem laut. Selain itu, masih banyak nelayan yang kurang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip perikanan berkelanjutan, yang menjadi salah satu syarat utama dalam mendapatkan sertifikasi MSC. Kurangnya pengetahuan ini berpotensi menghambat mereka untuk memenuhi standar MSC yang ditetapkan, yang mencakup keberlanjutan stok ikan, dampak terhadap lingkungan, dan pengelolaan yang transparan. Selain itu, kendala pendanaan juga menjadi hambatan besar bagi nelayan skala kecil, yang sering kali tidak memiliki akses ke modal yang cukup untuk meningkatkan praktik perikanan mereka sesuai dengan standar MSC. Proses sertifikasi MSC yang panjang dan memerlukan biaya yang cukup tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan yang sebagian besar bekerja dengan sumber daya terbatas. Mereka harus menghadapi biaya audit, pelatihan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mematuhi standar sertifikasi yang ketat.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pelatihan dan pendampingan teknis dari MSC dan KKP menjadi sangat penting. Program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam menerapkan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, seperti penggunaan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta bagaimana melaporkan hasil tangkapan secara

transparan. Selain itu, pendampingan teknis selama proses sertifikasi dapat membantu nelayan untuk lebih memahami setiap tahapan dan memastikan bahwa mereka memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh MSC. Selain itu, dukungan finansial yang berasal dari pemerintah, lembaga donor, serta sektor swasta juga sangat krusial. Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan subsidi atau dana pendamping untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan oleh nelayan, sementara lembaga donor dapat memberikan bantuan teknis dan pelatihan. Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menciptakan kemitraan yang menguntungkan antara nelayan dan perusahaan pengolahan perikanan, yang bisa memberikan insentif bagi nelayan untuk memenuhi standar keberlanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga donor, sektor swasta, dan MSC, diharapkan kendala-kendala yang dihadapi oleh nelayan skala kecil dapat diatasi, sehingga mereka bisa berhasil memperoleh sertifikasi MSC dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peningkatan akses ke pasar internasional yang lebih luas.

### **Sumber Daya yang Dialokasikan**

Sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung implementasi kerja sama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan *Marine Stewardship Council* (MSC) sangat krusial untuk memastikan keberhasilan sertifikasi MSC, terutama dalam konteks perikanan rajungan di Lamongan. Salah satu aspek penting dari sumber daya yang dialokasikan adalah sumber daya manusia yang berkompeten, yang bertugas untuk memberikan pelatihan dan melakukan evaluasi lapangan secara langsung. Tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang perikanan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan kepada nelayan dan pengelola perikanan, serta memastikan bahwa mereka dapat menerapkan praktik yang sesuai dengan standar MSC. Pelatihan ini tidak hanya mencakup pengetahuan teknis tentang penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, tetapi juga tentang cara mengelola perikanan secara berkelanjutan, mulai dari pemantauan stok ikan hingga pelaporan hasil tangkapan dengan transparansi yang tinggi. Selain itu, para evaluator yang terlibat dalam proses sertifikasi juga berperan penting dalam memantau pelaksanaan standar MSC di lapangan dan memastikan bahwa praktik perikanan berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang ditetapkan.

Pendanaan juga merupakan elemen yang sangat vital untuk mendukung proses sertifikasi MSC. Biaya yang terkait dengan audit, pelatihan, dan evaluasi memerlukan dana yang cukup besar, terutama untuk nelayan skala kecil yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya. Sebagian besar pendanaan untuk mendukung proses sertifikasi ini dibiayai oleh KKP, dengan bantuan dari lembaga donor internasional yang memiliki fokus pada keberlanjutan sektor perikanan. Lembaga donor internasional memainkan peran penting dalam memberikan dukungan finansial untuk memastikan bahwa sertifikasi MSC dapat diakses oleh seluruh pihak yang terlibat, terutama nelayan kecil yang menjadi sasaran utama program ini. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, nelayan skala kecil akan kesulitan untuk memenuhi biaya sertifikasi yang relatif tinggi, yang meliputi biaya audit, pelatihan, dan persiapan teknis lainnya. Oleh karena itu, kerja sama antara KKP, MSC, dan lembaga donor internasional sangat penting untuk memastikan keberhasilan sertifikasi MSC, serta untuk memperluas akses pasar bagi produk perikanan berkelanjutan yang diproduksi oleh nelayan lokal. Pendanaan ini tidak hanya mendukung proses sertifikasi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari sertifikasi dapat dirasakan oleh semua pihak, khususnya nelayan yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya perikanan (Chatra et al., 2024; Efani et al., 2024)

### **Implikasi Penelitian**

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam penerapan sertifikasi MSC pada sektor rajungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara KKP dan MSC memiliki potensi besar untuk

meningkatkan keberlanjutan sektor perikanan dan memperkuat daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Sertifikasi MSC tidak hanya memberikan akses pasar yang lebih luas dan meningkatkan harga jual produk, tetapi juga mendorong penerapan praktik perikanan yang bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat melindungi ekosistem laut dan mendukung kesejahteraan nelayan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat lokal dalam memastikan keberhasilan implementasi sertifikasi MSC dan mengatasi tantangan teknis serta sosial yang ada.

#### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini lebih fokus pada proses sertifikasi MSC di Lamongan dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan tantangan dan dinamika yang ada di daerah lain dengan karakteristik perikanan yang berbeda. Kedua, meskipun wawancara dengan pemangku kepentingan utama memberikan gambaran yang berguna, penelitian ini belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif lebih luas dari masyarakat nelayan di tingkat bawah yang mungkin tidak terjangkau dalam wawancara formal. Selain itu, data yang diperoleh dari survei daring mungkin terbatas oleh akses internet dan ketersediaan teknologi di daerah pesisir, yang dapat mempengaruhi representativitas hasil.

#### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, kerja sama antara KKP Indonesia dan MSC dalam sertifikasi produk rajungan di Lamongan menunjukkan potensi besar untuk memajukan keberlanjutan sektor perikanan, meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Namun, implementasi sertifikasi ini harus diimbangi dengan dukungan teknis, pendanaan, dan edukasi yang lebih intensif kepada nelayan, terutama nelayan skala kecil yang menghadapi berbagai kendala. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari sertifikasi MSC terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di tingkat mikro dan potensi penerapan model serupa di daerah lain. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara semua pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai.

#### **Referensi**

- Anderson, C. M., Himes-Cornell, A., Pita, C., Arton, A., Favret, M., Averill, D., Stohs, S., & Longo, C. S. (2021). Social and Economic Outcomes of Fisheries Certification: Characterizing Pathways of Change in Canned Fish Markets. *Frontiers in Marine Science*, 8, 1–16. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.791085>
- Arton, A., Leiman, A., Petrokofsky, G., Toonen, H., & Longo, C. S. (2020). What Do We Know About The Impacts of The Marine Stewardship Council Seafood Ecolabelling Program? A Systematic Map. *Environmental Evidence*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s13750-020-0188-9>
- Chatra, M. A., Sari, F. P., Munizu, M., Rusliyadi, M., Nuryanneti, I., & Judijanto, L. (2024). *Agribisnis: Strategi, Inovasi dan Keberlanjutan*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Costa, E., Bergman, P., Niimi, J., & Collier, E. S. (2024). Exploring Seafood Choices at The Point of Purchase Among A Sample of Swedish Consumers. *British Food Journal*, 126(13), 269–285. <https://doi.org/10.1108/BFJ-08-2023-0702>
- Efani, A., Hidayati, B., Manzilati, A., Tiarantika, R., Wahyuningsih, N. A., Farista, D., & Hidayat, F. (2024). *Transformasi Inkubasi Agribisnis: Era Baru Agribisnis Perikanan Kelautan Berkelanjutan*. UB Press.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Hardani, Andriani, H., Utami, E. F., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., Auliya, N. H., Ustiawaty, J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Cetakan 1, Issue Maret). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Harlyan, L. I., Rahman, M. A., Rihmi, M. K., & Abdillah, S. F. A. (2023). Biological Parameters and Spawning Potential Ratio of Longtail Tuna *Thunnus Tonggol* Landed in Kranji Fishing Port, Lamongan District, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24(12), 6527–6535. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d241214>
- Judijanto, L., Binayanti, Wulandari, U., Tenriawaruwaty, A., Minas, S., Wulansari, D., Ardiansyah, M., Damis, Mahmudin, T., Handayani, C., & Arif, M. (2019). *Perikanan. In Sustainability (Switzerland)*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Keyser, F., Sameoto, J. A., & Keith, D. M. (2022). Seasonal Trends in Groundfish Discards on Georges Bank: Implications for Adaptive Quota Management. *Marine and Coastal Fisheries*, 14(1), e210191. <https://doi.org/10.1002/mcf2.10191>
- Lawrence, S., Elliott, C., Huisman, W., Dean, M., & van Ruth, S. (2024). Food Fraud Threats in UK Post-Harvest Seafood Supply Chains; An Assessment of Current Vulnerabilities. *Npj Science of Food*, 8(1), 30. <https://doi.org/10.1038/s41538-024-00272-z>
- Longo, C. S., Buckley, L., Good, S. D., Gorham, T. M., Koerner, L., Lees, S., Liow, S. Y., Oloruntuyi, O., Schley, D., Rice, J., & Currey, R. J. C. (2021). A Perspective on the Role of Eco-Certification in Eliminating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.637228>
- Melnychuk, M. C., Veneziano, A., Lees, S., Rasal, J., Koerner, L. M., Hair, P., Costalago, D., Hively, D., Jardim, E., & Longo, C. (2022). Wild-Caught Fish Populations Targeted By MSC-Certified Fisheries Have Higher Relative Abundance Than Non-MS-Certified Populations. *Frontiers in Marine Science*, 9, 1–21. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.818772>
- Morris, K., Epstein, G., Kaiser, M. J., Porter, J., & Johnson, A. F. (2023). Adapting The Marine Stewardship Council's Risk-Based Framework to Assess The Impact of Towed Bottom Fishing Gear on Blue Carbon Habitats. *PLOS ONE*, 18(11), e0288484. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288484>
- Obregón, C., Admiraal, R., van Putten, I., Hughes, M., Tweedley, J. R., & Loneragan, N. R. (2020). Who You Speak to Matters: Information Sharing and the Management of a Small-Scale Fishery. *Frontiers in Marine Science*, 7, 1–16. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.578014>
- Oloruntuyi, O., Barendse, J., Marriott, M., Gordon, A. K., & Montero-Castaño, C. (2023). Pathway to Sustainability: The Marine Stewardship Council Certification Standard as An Improvement Framework or African Fisheries. *Frontiers in Marine Science*, 10, 1–22. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1042736>
- Patrisius Istiarto Djiwandono, & Yulianto, W. E. (2023). *Penelitian Kualitatif itu Mengasyikan: Metode Penelitian untuk Bidang Humaniora dan Kesusasteraan*. Penerbit Andi.
- Pramoda, R., & Putri, H. M. (2018). Ecolabelling Perikanan: Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) Untuk Produk Tuna (Studi Kasus: Bali). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(2), 159. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6098>
- Santos, B. S., Devereaux, S. G., Gjerde, K., Chand, K., Martinez, J., & Crowder, L. B. (2022). The Diverse Benefits of Biodiversity Conservation in Global Ocean Areas Beyond National Jurisdiction. *Frontiers in Marine Science*, 9, 1–8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.1001240>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Tulaeva, S., Tysiachniouk, M., Pappila, M., & Tynkkynen, M. (2023). Marine Stewardship Council Certification in Finland and Russia: Global Standards and Local Practices. *Sustainability*, 15(5), 4063. <https://doi.org/10.3390/su15054063>

- Wiadnya, D. G. R., Harlyan, L. I., Rahman, M. A., Mustikarani, S. M. I., Nadhiroh, E. N. S., & Taufani, W. T. (2023). Stock Status and Supporting Species of Anchovy Fisheries in The Northern of East Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 24(9), 4775–4782. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240918>
- Yuniwati, E. D., Javandira, C., & Purbadiri, A. M. (2025). *Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lokal untuk Pembangunan dan Kesejahteraan*. PT Penerbit Qriset Indonesia.